



Jakarta, 15 April 2025

Kepada Komite Parlemen Perdagangan Internasional Eropa
Perihal: Surat mengenai Peraturan Anti-Deforestasi Uni Eropa dan Catatan Rekomendasi koalisi organisasi masyarakat sipil Indonesia

Kepada Yth,
 Anggota komite perdagangan internasional (INTA)

Kami, para anggota Koalisi EUDR Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia yang bertanda tangan di bawah ini, menyambut hangat kunjungan para anggota komite perdagangan internasional (INTA) ke Indonesia dan menghargai komitmen anda dalam menangani isu deforestasi, tata kelola lahan, serta hak-hak masyarakat adat. Sebagai para advokat yang sejak lama telah membela keadilan lingkungan dan rantai pasok akuntabel, kami memandang kehadiran para anggota komite sebagai kesempatan yang tepat untuk memperkuat dialog yang konstruktif antara Indonesia dan Uni Eropa. Dalam semangat tersebut, kami ingin menyampaikan keprihatinan dan rekomendasi kami terkait pelaksanaan Peraturan Anti-Deforestasi Uni Eropa (EUDR), khususnya mengingat masih adanya tantangan struktural dan kelembagaan dalam tata kelola hutan dan lahan di Indonesia.

Jakarta, 15 April 2025

To European Parliament's International Trade Committee
Subject: Letter on the European Union Deforestation Regulation (EUDR) and Recommendations from the Indonesian Civil Society Organization EUDR Coalition

Dear Members of the Committee of International Trade (INTA),

We, the undersigned members of the Indonesian Civil Society Organisation EUDR Coalition, warmly welcome your visit to Indonesia and value your commitment to addressing deforestation, land governance, and Indigenous Peoples' rights. As long-standing advocates for environmental justice and accountable supply chains, we see your presence as a timely opportunity to strengthen constructive dialogue between the EU and Indonesia. In this spirit, we share our concerns and recommendations regarding the implementation of the EU Deforestation Regulation (EUDR), particularly in light of ongoing structural and institutional challenges within Indonesia's land and forest governance.



Melalui surat ini, kami menekankan pentingnya segera dilakukan proses benchmarking di bawah tingkat nasional dan spesifikasi komoditas di bawah pengaturan EUDR – kami menilai penting untuk dilakukan pendekatan yang mencerminkan realitas lokal secara akurat, mengingat adanya pengumuman rencana deforestasi skala besar di Papua pada tahun 2024. Kami juga mendorong Uni Eropa untuk menjamin perlindungan terhadap hutan primer, perlindungan kepada petani kecil dan perlindungan hak-hak buruh di tengah ketidakpastian akibat Undang-Undang cipta kerja (Omnibus law), serta pengakuan partisipasi masyarakat adat –khususnya melalui mekanisme Substantiated Concern. Kami juga menekankan pentingnya dukungan teknis dan finansial bagi para petani kecil untuk dapat memenuhi standar kepatuhan dan tidak terpinggirkan dari rantai pasok, yang berisiko memperburuk ketimpangan.

Untuk konteks dan informasi lebih lanjut, kami melampirkan dokumen pendukung

Terima kasih atas semua perhatian dan pertimbangan Anda.

Tertanda,

1. Sawit Watch
2. Transnational Palm Oil Labour Solidarity
3. Palm Oil Labour Coalition (Koalisi Buruh Sawit)
4. Satya Bumi
5. Kaoem Telapak

In this letter, we emphasise the urgent need for subnational and commodity-specific benchmarking under the EUDR—an approach that is essential to accurately reflect local realities, especially following the 2024 announcement of large-scale deforestation plans in Papua. We also urge the EU to ensure the protection of primary forests, meaningful inclusion of smallholders, safeguarding of labour rights under the precarious Omnibus Law on Job Creation, and recognition of Indigenous Peoples' participation—particularly through the Substantiated Concern mechanism. We also stress the importance of technical and financial assistance for smallholders to meet compliance standards and avoid exclusion from supply chains, which risks exacerbating inequality.

For further context and documentation, we have attached an appendix with supporting materials.

Thank you for all your kind attention and consideration.

Sincerely,

1. Sawit Watch
2. Transnational Palm Oil Labour Solidarity
3. Palm Oil Labour Coalition (Koalisi Buruh Sawit)
4. Satya Bumi
5. Kaoem Telapak



6. Link-AR Borneo

7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
8. WALHI/Friends of the Earth Indonesia
9. Pantau Gambut
10. Forest Watch indonesia
11. Independent Forest Monitoring Fund
12. PUSAKA Bentala Rakyat
13. Trend Asia
14. Auriga Nusantara
15. The Institute for Ecosoc Rights
16. Konfederasi KASBI
17. Madani Berkelanjutan

6. Link-AR Borneo

7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
8. WALHI/Friends of the Earth Indonesia
9. Pantau Gambut
10. Forest Watch indonesia
11. Independent Forest Monitoring Fund
12. PUSAKA Bentala Rakyat
13. Trend Asia
14. Auriga Nusantara
15. The Institute for Ecosoc Rights
16. Konfederasi KASBI
17. Madani Berkelanjutan



[LAMPIRAN: Konteks Indonesia terkait EUDR, Hutan Papua, Hak-Hak Pekerja, Hak Masyarakat Adat, dan Kebebasan Sipil]

A. Situasi Indonesia terkait hutan, Papua, dan Hak Asasi Manusia

Dalam konteks tata kelola hutan, berbagai media telah melaporkan bahwa kondisi perkebunan, sumber daya alam, dan pengelolaan hutan di Indonesia masih jauh dari komitmen keberlanjutan global. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hutan Indonesia kembali berada dalam ancaman. Prabowo berkomitmen untuk meningkatkan produksi bioetanol melalui pembukaan lahan seluas 2 juta hektare di hutan Papua, yang juga beresiko mengancam lebih dari 5 juta hektare hutan alam Indonesia, seiring dengan upaya meningkatkan campuran biodiesel sawit hingga 100%. Presiden Prabowo Subianto berusaha membuka lahan hingga 20 juta hektare untuk mengembangkan produksi pangan dan energi—usaha ini perlu mendapat perhatian khusus.

Pada tahun 2024, Satuan tugas Sawit mengumumkan bahwa terdapat 3,3 juta hektare perkebunan kelapa sawit beroperasi di atas lahan ilegal. Namun, upaya penyelesaian administrasi yang dilakukan para lembaga eksekutif diliputi praktik korupsi.

[APPENDIX: INDONESIAN CONTEXT ON EUDR, PAPUAN FOREST, LABOUR RIGHTS, INDIGENOUS PEOPLES RIGHTS, AND CIVIL LIBERTIES]

A. Indonesian situation on forest, Papua, and human rights

On forest governance, many media outlets have reported on the condition of plantations, natural resources, and forest governance in Indonesia that still do not meet global sustainability commitments. Under the new administration of President Prabowo Subianto, Indonesia's forests are again under threat. Subianto's commitment aims to increase bioethanol production by deforesting 2 million hectares of Papua's forests, which also threatens more than 5 million hectares of Indonesia's natural forests by increasing the palm oil biofuel mix to 100%. Subianto is inclined to clear 20 million hectares of forest for food and energy production development. This undertaking deserves special attention.

In 2024, the Palm Oil Task Force announced that 3.3 million hectares of palm oil plantations operated on illegally used land. However, the executive efforts to resolve the



Pada sistem ketelusuran (traceability) masih lemah, hingga April 2024 hanya 35,6% perkebunan yang tersertifikasi di bawah ISPO. Koordinasi antar lembaga pemerintah juga masih terbatas dan data kelapa sawit tidak terorganisir dengan baik, serta minimnya transparansi. Pada saat yang bersamaan, terdapat 75 konflik agraria yang sedang berlangsung antara perusahaan dan masyarakat yang terkena dampak bisnis kelapa sawit. Dalam laporan KPA di tahun 2025 menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat dan perlindungan hak masyarakat yang lebih baik. Di tengah kenyataan bahwa aparat militer dan kepolisian menjadi pelaku konflik agraria, Kementerian Kehutanan justru menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan TNI untuk meresmikan peran militer dalam perlindungan dan rehabilitasi hutan—yang dikhawatirkan akan memperburuk situasi.

Terkait Hak-Hak Masyarakat adat dan hutan di Papua, kami menaruh perhatian khusus. Presiden Prabowo, dalam masa awal jabatannya, mengunjungi Merauke Papua Selatan untuk mempromosikan Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa Kawasan Pangan dan Energi (Food Estate) Merauke. Proyek ini bertujuan mengkonversi sekitar dua juta hektare hutan primer, mangrove, sabana, dan rawa—yang merupakan wilayah hidup masyarakat adat Papua—menjadi kawasan pertanian industri, termasuk 1,5 juta hektar diperuntukan sawah dan 500.000 hektar untuk perkebunan tebu, dikuasai

administrative issues were plagued by corruption.

The supply chain traceability system is still weak, with only 35,6% of plantations being

certified under ISPO per April 2024. Coordination between government agencies is also limited, and data on palm oil remains scattered and lacking transparency. At the same time, an ongoing 75 land conflicts between companies and impacted communities from palm oil business (KPA, 2025) show that law enforcement needs to be strengthened and community rights better protected. While military and police officers are the perpetrators of land tenure conflict, the Ministry of Forest, together with the Indonesian military, made a Memorandum of Understanding (MoU) to formalise their role in forest protection and rehabilitation, potentially worsening the situation.

On Papua forest and indigenous People's rights, we put it with special concern. President Prabowo, within his first days in office, visited Merauke, South Papua, to promote the National Strategic Project (PSN) for the Merauke Food and Energy Zone. This initiative aims to convert approximately two million hectares of primary forests, mangroves, savannas, and swamps—home to Indigenous Papuans—into industrial agricultural zones, including 1.5 million hectares for rice fields and 500,000 hectares for sugarcane plantations



kurang dari sepuluh korporasi. Hal ini sejalan dengan ambisinya membuka [20 juta](#) hektare lahan demi transisi energi dan ketahanan pangan, utamanya melalui perluasan perkebunan kelapa sawit.

Namun, riset yang dilakukan Organisasi non-pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa kapasitas maksimum perkebunan sawit di Indonesia hampir tercapai, dengan [17,77 juta hektare](#) telah digunakan dari batas maksimum yang diproyeksikan sebesar [18,1 juta hektar](#).

Hal yang sangat mengkhawatirkan adalah Presiden Prabowo mengerahkan sekitar 3.000 personel TNI untuk mengamankan proyek di Merauke. Pembela HAM dari komunitas adat Malind dan Yei yang menolak proyek tersebut dihadapkan dengan [ancaman dan intimidasi](#) dari militer.

Lebih lanjut, [legalitas pelepasan kawasan hutan dan perizinan usaha dari sepuluh perusahaan yang terlibat dalam rencana perkebunan tebu pun masih dipertanyakan](#). Secara historis, proyek ekstraksi sumber daya alam di Papua Barat dipenuhi dengan pelanggaran hukum, salah satunya tidak dilakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) secara menyeluruh sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan hukum Indonesia serta ketidakpatuhan terhadap prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent).

controlled by fewer than ten corporations. This aligns with his administration's broader ambition to open [20 million](#) hectares of land

for energy transition and food security, primarily through palm oil plantations.

However, research by Indonesian NGO's estimates that Indonesia's palm oil plantations are already near their maximum capacity, with [17.77 million hectares](#) in use out of a projected upper limit of [18.1 million hectares](#).

In a troubling development, President Prabowo has deployed approximately 3,000 TNI personnel to secure the Merauke project. Human rights defenders from the Malind and Yei Indigenous communities, who have opposed the project, have faced [threats and intimidation](#) from the Indonesian military.

Furthermore, [the legality of forest release and business permits for ten companies involved in the proposed sugarcane plantations remains in question](#). Historically, natural resource extraction projects in West Papua have been riddled with legal irregularities, including failure to conduct full environmental impact assessments as required by Indonesian law and non-compliance with international Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principles.



Begitupun juga gerakan masyarakat sipil, meningkatnya risiko lingkungan, demokrasi Indonesia terus mengalami kemunduran. Publikasi Economist Intelligence Unit (EIU) di tahun 2024 mengklasifikasi Indonesia sebagai

As for the civil society movements, these increased environmental risks are happening as Indonesia's democracy continues to

“demokrasi cacat” dikarenakan kekuasaan yang terpusat dan lemahnya kebebasan sipil. Hal ini relevan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, sebagaimana membentuk Satgas pengawas dan pelaksana dengan komposisi yang didominasi oleh militer.

decline. A publication in 2024 by the Economist Intelligence Unit (EIU) classified

Indonesia as a “flawed democracy” due to its centralised power and weakened civil liberties. This continues to be relevant with the recent Presidential Regulation No. 5 of 2025 on Forest Area Order (Penertiban Kawasan Hutan), which establishes a Task Force consisting of Supervisors and Implementers dominated by military personnel.

Seluruh situasi di atas menunjukkan kecenderungan birokrasi yang militeristik, yang telah menimbulkan kekhawatiran terhadap peluang proses demokrasi yang adil serta melemahkan kapasitas Indonesia dalam menangani isu lingkungan dan HAM secara efektif.

All of the aforementioned issues point to a militaristic bureaucracy, which raises concerns for the opportunities for a just democratic process in the future and the weakening of Indonesia’s ability to effectively tackle environmental and human rights issues.

B. EUDR sebagai peluang perbaikan tata kelola hutan di Indonesia

Faktanya, terlepas dari sikap penolakan atau dialog politik dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri, beberapa kementerian pendukung seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (meskipun masih menemui kendala

B. The EUDR as an opportunity to improve Indonesia’s forest governance

In fact, despite the EUDR pushback/political communication from the Coordinating Ministry of Economy and the Ministry of Foreign Affairs, the supporting ministries, like the Ministry of Forestry (checking on the SVLK bottleneck but idle on supplying forest



pada SVLK dan penyediaan data ke Nasional Dashboard belum optimal), Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, mereka sedang melakukan persiapan pada pelaksanaan EUDR.

Kami mencatat beberapa perkembangan positif EUDR di tingkat tata kelola, di antaranya:

1. **Perbaikan sertifikasi ISPO oleh Kementerian Pertanian:** Kementerian Pertanian (2024) mengakui kesenjangan antara EUDR dan ISPO (tanggal batas, informasi geolokasi, area yang diizinkan untuk deforestasi, syarat penanaman baru, serta informasi legal terkait EUDR, dan aspek *traceability*). Dalam perbaikan ISPO, percepatan e-STB melalui penyederhanaan persyaratan akan memperkuat kepatuhan terhadap EUDR.
2. **Anggaran Negara untuk Smallholder Sustainable Certification (STDB):** Untuk percepatan implementasi STDB hingga akhir 2025 bagi 8 juta petani kecil (13 juta hektar) Kementerian Pertanian (2025) mengalokasikan anggaran negara agar petani swadaya dapat mengirimkan produk mereka ke pasar Uni Eropa.

data to the National Dashboard), the Ministry of Trade, and the Ministry of Agriculture, are preparing themselves for EUDR.

We monitored the positive developments towards EUDR at the governance level, notably:

1. **Indonesia National Sustainable Certification on Palm Oil (ISPO) revision from the Ministry of Agriculture:** The Ministry of Agriculture (2024) acknowledged the gap between EUDR and ISPO (cut-off date, geolocation information, deforestation permitted in areas, new planting requirements, some EUDR information related to legal requirements, traceability aspects, and the ISPO Mass Balance supply chain system). However, in the ISPO revision, especially related to traceability, acceleration of e-STDB through simplification of requirements will bolster the EUDR compliance
2. **State budget for Small Holder Sustainable Certification (STDB):** to accelerate STDB implementation by the ends of 2025 for 8 mil smallholders (13 mil ha), Ministry of Agriculture (2025) release the state budget for independent farmers so they can send their products to the EU



3. **Perbaikan untuk komoditas karet dan kakao:** Terkait EUDR, pada Oktober 2023 Kementerian Perdagangan menyusun Joint Communique tentang karet alam untuk menghadapi EUDR (pembahasan mengenai pasar dan traceability); Kementerian pertanian mengembangkan sertifikasi keberlanjutan untuk karet dan kakao.

Bagaimanapun, kami juga meyakini bahwa proses benchmarking dapat mengungkapkan kasus-kasus deforestasi secara signifikan. Dalam komunikasi yang kami lakukan dengan Direktorat Jenderal Lingkungan, Komisi Eropa pada Juli dan September 2024, kami menyampaikan kekhawatiran bahwa proses benchmarking EUDR harus benar-benar berkomitmen untuk menekan deforestasi dan melindungi hak asasi manusia dengan pendekatan di bawah tingkat nasional dan per komoditas.

Di tingkat nasional kebijakan benchmarking EUDR untuk semua komoditas berisiko tidak memenuhi tujuan untuk melihat area tertentu yang diminati; sebaliknya, prosesnya cenderung mengabaikan perbedaan karakteristik seluruh antar komoditas dan skala bisnis. Kebijakan ini dapat **menambah beban petani dengan beban administratif**—terutama bagi mereka yang belum terorganisir dalam kelompok tani atau tidak memiliki akses terhadap bantuan teknis dan pembiayaan—tanpa mengatasi tantangan struktural yang mereka hadapi. Akibatnya kelompok-kelompok ini berisiko dikecualikan

3. **Improvement for rubber and cocoa plantation:** In regard of EUDR, on October 2023, the Ministry of Trade develop Joint Communique on natural rubber to face EUDR (discussing on market, traceability); Ministry of Agriculture develop sustainable certification on rubber and cocoa

Moreover, we believe that the benchmarking process may expose significant deforestation cases. In our correspondence with the Directorate General of Environment, European Commission, in July 2024 and September 2024, we expressed concerns that the EUDR benchmarking process should commit to the true nature of curbing deforestation and protect human rights with a sub-national and per-commodity scheme.

The national-level benchmarking policy for EUDR across all commodities risks not serving the purpose of seeing a particular area of interest; instead, the process is prone to overlooking the differing characteristics among commodities and business scales. This policy may impose **additional administrative burdens on farmers**—especially those not yet organised in farmer groups or lacking access to technical assistance and financing—without addressing the structural challenges they face. As a result, these groups risk being excluded from global supply chains if they



dari rantai pasok global jika mereka tidak dapat memenuhi standar yang diberlakukan.

Agar benar-benar berdampak, pelaksanaan EUDR harus **mencerminkan kompleksitas di lapangan** dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat adat serta komunitas lokal, yang sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh ekspansi komoditas. Regulasi ini tidak hanya harus menekan kepatuhan legal dan teknis, tetapi juga mendorong keadilan sosial dan akses pasar yang inklusif bagi petani kecil.

C. Rekomendasi Masyarakat Sipil Indonesia

Pertama, kami mendorong INTA untuk memastikan para pembuat kebijakan Eropa, termasuk Otoritas Kompeten, telah diperbarui dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang beresiko terhadap hutan dan hak asasi manusia, seperti UU Cipta kerja, UU pertambangan, UU TNI, dan target NDC-FOLU Indonesia. Informasi ini penting untuk memahami konteks kasus ketidakpatuhan.

Kedua, kategori tingkat risiko negara harus berbasis bukti, adil, dan bebas dari pengaruh politik. [Surat](#) sebelumnya dari Koalisi EUDR menyoroti risiko deforestasi dan kerentanan di Papua, dan merekomendasikan **evaluasi benchmarking regional serta menganggap papua sebagai risiko tinggi**.

are unable to meet the imposed standards.

To be truly impactful, the implementation of EUDR must **reflect on-the-ground complexities** and uphold the rights of Indigenous Peoples and local communities, who are often disproportionately affected by commodity expansion. The regulation should not only emphasise legal and technical compliance but also promote social equity and inclusive market access for smallholders (beyond the canopy).

C. Indonesia's civil society strongly suggests:

First, we strongly encourage INTA to ensure that the European policymakers, including Competent Authorities, are updated with the laws and regulations in Indonesia that put forest and human rights at risk. These include the Omnibus Law on Job Creation, the Mining Law, the Military Law, and Indonesia's NDC-FOLU. This dataset is useful for contextualising non-compliance cases.

Second, categorising countries by their risk levels must be evidence-based, fair, and free from political influence. Previous [letter](#) by the EUDR Coalition on benchmarking highlights the risks of deforestation and vulnerability in Papua, which recommends



regional benchmarking evaluation and considers it as a high risk factor.

Ketiga, kami mengapresiasi mekanisme *substantiated concern* dalam EUDR sebagai bentuk partisipasi publik untuk melaporkan ketidakpatuhan. Namun belajar dari regulasi pasar lainnya, hal ini berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal, yang menghambat dukungan pekerja terhadap EUDR. Hal ini terkait langsung dengan UU Cipta Kerja yang memperburuk kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Maka, isu perlindungan tenaga kerja sebagai dampak dari sanksi perlu diperhatikan dalam kerangka EUDR.

Keempat, Petani kecil di Indonesia perlu didukung dengan bantuan teknis dan/atau finansial agar dapat mematuhi regulasi dan tidak tereksklusi dari rantai pasok, yang berpotensi memperburuk ketimpangan.

Kelima, Perlu difasilitasi dan disediakan dana bagi organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk menuntut akuntabilitas perusahaan terhadap catatan lingkungan dan HAM mereka, serta memanfaatkan regulasi uji tuntas (EUDR dan CSDDD mendatang) guna memperkuat penegakan hukum dan tata kelola hutan.

Koalisi CSO Indonesia untuk EUDR berharap dapat berkontribusi secara bermakna terhadap pelaksanaan EUDR. Dalam semangat ini, kami mengajak Komite INTA untuk mempertimbangkan dan mengadvokasikan rekomendasi-rekomendasi ini, yang mencerminkan perspektif masyarakat sipil dan pengalaman komunitas di lapangan.

Third, we acknowledge the Substantiated Concern mechanism provided by the EUDR as a form of public participation to report non-compliance. Learning from other market-bans regulations, it could lead to mass layoffs for workers, which hampers their support of the EUDR. This is also due to Indonesia's Job Creation Law, which is the culprit for the precarious environment in Indonesia's job market. We think the issue of labour protection as a result of the sanctions needs to be taken into account under EUDR.

Fourth, Indonesia's smallholders need to be supported with a form of technical or financial assistance for their compliance to avoid exclusion from supply chains, which could worsen inequality.

Fifth, facilitate and provide funding facilities for Indonesian CSOs to hold companies accountable for their environmental and human rights records and leverage due diligence legislation (EUDR, upcoming CSDDD) to strengthen law enforcement and forest governance.

The Indonesia CSO EUDR Coalition hopes to contribute meaningfully to the implementation of the EUDR. In this spirit, we call on the INTA committee to consider and advocate for these recommendations which reflect the perspectives of civil society, including experiences of communities on the ground.



[LAMPIRAN: BAHAN PENDUKUNG]

1. **Mendesak Uni Eropa untuk Memasukkan Krisis Deforestasi Papua dalam Sistem Benchmarking EUDR**
Surat dari Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia. Siaran pers yang dipublikasikan di satyabumi.org pada Maret 2025.
2. **Pertimbangan Benchmarking Indonesia terhadap kesiapan EUDR**
Naskah posisi oleh Masyarakat Sipil Indonesia. Dipublikasikan di satyabumi.org pada Juni 2024.
3. **Urgensi Perbaikan Tata Kelola Sawit melalui Kebijakan Penghentian Penerbitan Izin dari Perspektif Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (D3TLH)**
Policy brief kolaboratif antara masyarakat sipil dan organisasi riset yang dipublikasikan di satyabumi.org pada November 2024.
4. **Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penataan Kawasan Hutan.**
Membentuk satuan tugas dengan peran pengawasan yang melibatkan militer. Menimbulkan kekhawatiran tentang militerisasi tata kelola hutan.

[ANNEX: SUPPORTING MATERIALS]

1. **Urge EU to Take Papua Deforestation Crisis into Account in EUDR Benchmarking System**
Letter by Indonesia Civil Society Organizations. Press release published on satyabumi.org in March 2025.
2. **Consideration for Benchmarking Indonesia's EUDR Readiness**
Position paper by Indonesia Civil Society. Published on satyabumi.org in June 2024.
3. **Urgency of Improving Palm Oil Governance through the Policy of Terminating the Issuance of Permits from an Economic and Environmental Capacity (D3TLH) Perspective**
A collaborative policy brief by civil society and research organization published on satyabumi.org in November 2024.
4. **Presidential Regulation No. 5 of 2025 Of Forest Area Order.**
Establishes a task force with supervisory roles involving the military. Raises concern over militarisation of forest governance.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024

Mengatur kegiatan sawit ilegal melalui denda administratif. Namun, laporan masyarakat sipil menunjukkan rendahnya implementasi dan transparansi.

6. Jika Militer Mengelola Perkebunan Sawit yang Bermasalah

Publikasi oleh Tempo yang mengungkap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam budidaya sawit ilegal di dalam kawasan hutan, dipublikasikan pada Maret 2025.

7. Apakah Ada Reforma Agraria di Bawah Komando Prabowo?

Rekap akhir tahun 2024 oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang dipublikasikan di kpa.or.id pada 2025. Menyoroti statistik konflik agraria di sektor perkebunan yang didominasi oleh kelapa sawit.

8. Rencana Deforestasi untuk Membuka Lahan Sawit dan 20 Juta Hektare Hutan Dianggap Mengancam Masyarakat Adat

Publikasi oleh Tempo yang menyoroti rencana Indonesia untuk memfasilitasi deforestasi lebih lanjut, dipublikasikan pada Januari 2025.

9. Merauke Menolak Dihantam oleh Food Estate

Dipublikasikan oleh betahita.id pada Oktober 2024. Mengangkat suara

5. Government Regulation No. 21/2024

Regulates illegal palm oil activities through administrative fines. However, civil society reports low implementation and transparency.

6. If the military manages problematic palm oil plantations

Publication by Tempo exposing companies involved in illegal palm oil cultivation within forest areas published in March 2025.

7. Is There Agrarian Reform Under Prabowo's Command?

A 2024 end-of-year recap by Konsorsium Pembaruan Agraria published in kpa.or.id in 2025. Highlighting the statistics of land conflict in the plantation sector, dominated by palm oil.

8. Deforestation Plans to Clear Palm Oil Land and 20 Million Hectares of Forest Considered Endangering Indigenous Communities

Publication by Tempo highlighting Indonesia's plan facilitating further deforestation published in January 2025.

9. Merauke Refuses to be Battered by Food Estate



Solidaritas Merauke yang menyoroti ancaman Program Strategis Nasional di Merauke terhadap kelompok masyarakat adat.

Published by betahita.id in October 2024. Bringing forward Solidaritas Merauke which emphasizes concerns on the National Strategic Program in Merauke, threatening indigenous groups.